

ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JATIM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Hilda Salma Jundia¹⁾, Aris Eddy Sarwono²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

¹⁾raku8621@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of financial statements, namely breaking down the records in the financial statements which are part of the basic information and examining important or related relationships using quantitative and non-quantitative data for the purpose of obtaining financial data that is considered important in decision making. The purpose of this study is to be able to evaluate the financial performance of the East Java Provincial Government using an analysis of the regional budget reports for 2018-2022. This type of research is descriptive qualitative with a case study approach. The information processed is a report on the implementation of the East Java Provincial Government's budget for the 2018-2022 fiscal year obtained from an online publication published on the official website <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. This 53.807% is based on the East Java Provincial Government's LRA data processing for the 2018-2022 fiscal year. The analysis used in the analysis of regional economic indicators is financial ratio analysis which calculates the Degree of Independence, the Degree of Fiscal Decentralization, the Efficiency Ratio, the Ratio of Effectiveness and the Regional Financial Capability. While the analysis used to analyze regional financial capacity is the calculation of the share and growth rate as well as a map of the capacity of the regional economy. Based on the calculations and analysis of regional economic indicators, it can be concluded that the relationship model for the degree of regional autonomy in Manado City is a better criterion. The level of decentralization of financial activities is still ongoing, but the efficiency ratio is very effective and the efficiency ratio is also very effective. Regional financial capabilities can be concluded that the economic situation of East Java Province is still not ideal. Based on market share and growth calculations, the position of East Java Province is in the second quadrant and the profitability of the East Java province's economy is relatively high.

ABSTRAK

Analisis laporan keuangan yakni memecah catatan-catatan dalam laporan keuangan yang menjadi bagian informasi dasar dan memeriksa keterkaitan yang penting atau berkaitan menggunakan data kuantitatif dan non kuantitatif untuk tujuan dapat memperoleh data keuangan yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah dapat mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis laporan APBD daerah pada tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi yang diolah adalah laporan pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022 yang diperoleh dari publikasi online yang dimuat di website resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Sebesar 53,807% ini berdasarkan pengolahan data LRA Pemprov Jatim tahun anggaran 2018-2022. Analisis yang digunakan dalam analisis indikator perekonomian daerah adalah analisis rasio keuangan yang menghitung Derajat Kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah perhitungan pangsa dan laju pertumbuhan serta peta kapasitas perekonomian daerah. Berdasarkan perhitungan dan analisis indikator perekonomian daerah dapat disimpulkan bahwa model hubungan derajat otonomi daerah Kota Manado merupakan kriteria yang lebih baik. Tingkat desentralisasi kegiatan keuangan masih berjalan, namun rasio efisiensinya sangat efektif dan rasio efisiensinya juga sangat efektif. Kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa keadaan perekonomian Provinsi Jawa Timur masih belum ideal. Berdasarkan perhitungan pangsa pasar dan pertumbuhan, posisi Provinsi Jawa Timur berada pada urutan kuadran II dan profitabilitas perekonomian provinsi Jawa Timur relatif tinggi.

Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah, Rasio Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah

1. PENDAHULUAN

“Akuntansi diartikan sebagai seni, ilmu pengetahuan atau teknologi, namun dapat juga diartikan sebagai suatu proses berdasarkan ukuran dan bentuk organisasi yang menggunakan informasi akuntansi, bidang akuntansi dapat digolongkan

menjadi dua bidang utama, yaitu: akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor swasta adalah proses akuntansi untuk mencatat aktivitas keuangan organisasi nirlaba/organisasi profit, atau dengan kata lain perusahaan swasta/pemilik swasta”. Pada saat yang sama,

akuntansi sektor publik diperuntukkan bagi organisasi nirlaba seperti yayasan, LSM, dan pemerintah. (Pramono, 2014)

Realisasi belanja APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 hanya mencapai 13,43 persen. Rekor Kementerian Dalam Negeri Jawa Timur meraih beberapa penghargaan kategori pendapatan APBD tertinggi dalam kompetisi APBD Award 2022-2023 dan menempati peringkat kelima di antara provinsi lainnya. Dengan besaran realisasi APBD dapat dioptimalkan untuk beberapa faktor antara lain peredaran uang di masyarakat, peningkatan daya beli/belanja masyarakat, dan peningkatan perekonomian masyarakat. (kemendagri.go.id, 2023)

Realisasi belanja APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 hanya mencapai 13,43 persen. Rekor Kementerian Dalam Negeri Jawa Timur meraih beberapa penghargaan kategori pendapatan APBD tertinggi dalam kompetisi APBD Award 2022-2023 dan menempati peringkat kelima di antara provinsi lainnya. Dengan besaran realisasi APBD dapat dioptimalkan untuk beberapa faktor antara lain peredaran uang di masyarakat, peningkatan daya beli/belanja masyarakat, dan peningkatan perekonomian masyarakat. (Nasrum, 2018)

Otonomi daerah dapat mempengaruhi hasil ekonomi seluruh daerah, kegiatan ekonomi provinsi harus disajikan secara jelas dan efektif, dan ekonomi daerah harus didukung secara finansial. Pengelolaan perekonomian daerah harus dipersiapkan secara matang oleh daerah pada setiap dinas perekonomian daerah dengan kegiatan yang meliputi antara lain: Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian dan pelaporan perekonomian daerah. Pengelolaan ekonomi daerah dapat dimasukkan dalam laporan APBD. (Drastiana & Himmati, 2021)

APBD adalah laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode tertentu. Ini memberikan ikhtisar tentang kapasitas pengambilan keputusan Dewan. APBD merupakan program kota terpenting yang mendukung pengembangan kapasitas kotamadya. Kota memiliki kewajiban untuk secara transparan menginformasikan tentang kewajiban pelaporan penggunaan uang publik. Salah satu bentuk transparansi daerah kepada publik adalah penyediaan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah secara faktual (Oci et al., 2023).

Pelaporan ekonomi daerah digunakan untuk meningkatkan transparansi dan sebagai ukuran keputusan ekonomi, sosial bahkan politik, sebagai tanda tanggung jawab pengelolaan ekonomi daerah, dan sebagai bahan evaluasi efisiensi daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian terpenting dalam membangun sistem manajemen yang baik di dewan. Salah satu teknik analisis pelaporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan merupakan suatu metrik yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Hubungan ekonomi dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dianalisis dengan menghitung indikator ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa cara menghitung output ekonomi daerah, antara lain derajat kemandirian, derajat desentralisasi keuangan publik, rasio efisiensi, rasio efisiensi, dan rasio biaya harmonisasi pendapatan dan belanja APBD. Sedangkan perhitungan kapasitas perekonomian daerah dilakukan dengan menghitung proporsi dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah, peta kemampuan ekonomi daerah dan indeks kemampuan ekonomi. Setiap penghitungan kemudian dievaluasi dengan membandingkan hasil regional suatu musim dengan periode sebelumnya untuk menentukan tren. Dalam mengevaluasi kinerja keuangan provinsi yang paling terlibat dalam pekerjaan pembangunan daerah, diharapkan diperoleh analisis ukuran keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dari penjelasan sebelumnya, penulis mengkaji sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian daerah. Hasil analisis hubungan ekonomi daerah dapat dijadikan pedoman pengembangan manajemen lintas periode kerja ekonomi daerah. Oleh karena itu penulis tertarik dengan penelitian tersebut "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018-2022".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja perekonomian daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil perhitungan indeks kemandirian, desentralisasi perpajakan, efisiensi, efektivitas dan harmonisasi belanja APBD. Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022?
2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur diukur dengan Porsi dan Pertumbuhan APBD, Peta Kapasitas Keuangan Daerah dan Indeks Kapasitas Keuangan (CFI) tahun anggaran 2018-2022?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan beban yang disusun dan diukur berdasarkan *accrual basic*. Kesimpulannya adalah sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan atau instansi dalam perkembangan manajemen ekonominya. Analisis laporan keuangan adalah interpretasi laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial atau politik. (Harahap, 2020)

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan pengurus daerah, Undang-undang No. Menurut Pasal 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

uang mengikuti asas penugasan juga mencakup pengalihan sumber keuangan yang sebelumnya dikuasai negara, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hal tersebut harus dibenahi dalam sistem pengelolaan perekonomian daerah. Perekonomian daerah harus dikelola dengan akuntansi yang jelas dan benar, dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk sistem administrasinya, harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, diharapkan daerah dapat menyusun dan menetapkan APBD sendiri. (Khikmah, 2014)

Laporan keuangan administrasi daerah merupakan laporan keuangan yang disusun dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga berfungsi sebagai alat agregasi. Proses penyusunan laporan keuangan provinsi pada hakikatnya sama dengan proses penyusunan laporan keuangan yang telah dijelaskan pada prosedur sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus rekening reksa (rekening RK PPKD di laporan rekening SKPD dan rekening RK SKPD di laporan keuangan PPKD) (bpk.go.id, n.d.)

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pemerintah meliputi laporan anggaran, laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan kinerja anggaran mencakup Laporan Kinerja Anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran (SAL). Laporan keuangan meliputi neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan laporan arus kas. CaLK adalah laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut tentang laporan kepatuhan anggaran, laporan keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kepatuhan anggaran dan laporan keuangan. (Pilat & Morasa, 2017)

Anggaran adalah rencana tindakan berupa rencana pemasukan dan pengeluaran. Dalam bentuknya yang paling sederhana, anggaran adalah dokumen yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi dan berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan pada fase berikutnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan kewenangan daerah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Diatur oleh pemerintah daerah, PDBD pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan daerah berdasarkan peraturan daerah yang dinyatakan dalam rupee GDPD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pengertian APBD menurut hukum angka. 32/2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dalam peraturan daerah (perda). (Pilat & Morasa, 2017)

Salah satu tata cara/teknik dalam melakukan analisis laporan keuangan yaitu dengan melakukan perhitungan rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio difokuskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari periode ini dengan periode sebelumnya, untuk mengetahui kecenderungannya. Atau, pengukuran juga dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang potensi rasio keuangan daerahnya relatif sama, bagaimana perbandingan pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan rasio keuangan terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018-2022. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu (Pilat & Morasa, 2017) :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah Pusat dan bantuan}} \times 100\%$$
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$
3. Rasio Efektivitas

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$
4. Rasio Efisiensi

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$
5. Rasio Keserasian Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
6. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

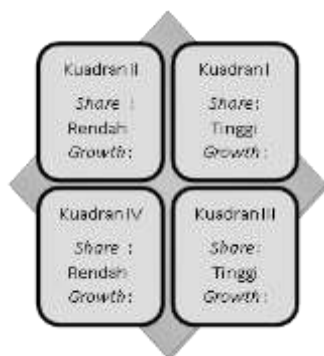
Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan cara :

1. Perhitungan dan Analisis Share Dan Growth

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

2. Peta Kemampuan Keuangan



3. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan dengan metode ini menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yang menjadi objek penelitian dan yang tujuannya untuk menunjukkan realitas tersebut sebagai ciri, watak, watak, model, tanda atau untuk menggambarkan keadaan, situasi atau keadaan tertentu. fenomena. fenomena. Studi kasus digunakan, yaitu. studi mendalam tentang orang (baik kelompok, organisasi atau individu), peristiwa, konteks, dan tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang studi kasus. Informasi dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumen. Studi kasus merupakan salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus tertentu dari objek analisisnya. Dalam hal analisis kasus (seperti dalam analisis kualitatif pada umumnya), peneliti memiliki kebebasan untuk menyusun teks berdasarkan bidang yang diteliti dan keinginan peneliti dalam kaitannya dengan bidang yang diteliti.

Pekerjaan penelitian biasanya tidak terfokus pada tempat yang menjadi tujuan penelitian, karena bahan yang tersedia hanyalah informasi halaman yang diperoleh dari halaman <https://djkp.kemenkeu.go.id/>. Selain itu diperoleh dari kajian bibliografi dan penelitian sejenis yang dimuat dalam jurnal ilmiah untuk mencari sumber teori dan penerapannya.

Kajian ini menggunakan data historis khususnya data sekunder berupa laporan pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2018-2022 yang dipublikasikan di website <https://djkp.kemenkeu.go.id/>. Selain itu, sumber penelitian teori dan aplikasinya diperoleh dari penelusuran literatur dan penelitian sejenis yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data tidak mungkin diperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, pencarian data literatur kelembagaan yang relevan dengan topik, dan penelitian literatur untuk mendukung data penelitian yang belum terkumpul melalui observasi dan wawancara. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini berupa; ikhtisar Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022 dan data lain yang diperlukan terkait metode analisis yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data ini antara lain:

- 1 Menghitung rasio keuangan dari data yang diperoleh dengan tabulasi.
- 2 Gambarkan grafik hasil perhitungan rasio keuangan untuk setiap periode.
- 3 Deskripsi data dari menghitung rasio keuangan atau dengan melihat grafik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rasio Kemandirian

Tahun anggaran	Realisasi PAD	Bantuan pemerintah dan pinjaman	Rasio kemandirian	Pola Hubungan
2018	37.086,32 M	74.474,76 M	49,798%	Rendah
2019	39.344,67 M	77.754,52 M	50,601%	Sedang
2020	37.042,89 M	73.317,23 M	50,524%	Sedang
2021	40.942,41 M	78.032,21 M	52,469%	Sedang
2022	42.769,19 M	73.330,59 M	58,324%	Sedang

Keterangan :

- Rendah sekali : 0%-25%
- Rendah : 25-50%
- Sedang : 50-75%
- Tinggi : 75-100%

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun anggaran	Realisasi PAD	Total pendapatan daerah	Rasio derajat desentralisasi fiskal	Kriteria desentralisasi fiskal
2018	37.086,32 M	115.182,34 M	32,198%	Cukup
2019	39.344,67 M	125.352,39 M	31,387%	Cukup
2020	37.042,89 M	128.587,74 M	28,807%	Sedang
2021	40.942,41 M	122.027,62 M	33,552%	Cukup
2022	42.769,19 M	120.414,54 M	35,518%	Cukup

Keterangan :

- Sangat kurang : 0,00%-10%
- Kurang : 10,1%-20%

Sedang : 20,1%-30%
 Cukup : 30,1%-40%
 Baik : 40,1%-50%
 Sangat baik : >50%

Tabel 3. Rasio Efektivitas

Tahun anggaran	Realisasi PAD	Target penerimaan PAD berdasarkan potensi Riil Daerah	Rasio efektivitas	Kriteria rasio efektivitas
2018	37.086,32 M	32.815,36 M	113,015%	Sangat Efektif
2019	39.344,67 M	35.465,94 M	110,936%	Sangat Efektif
2020	37.042,89 M	39.782,73 M	93,113%	Tidak Efektif
2021	40.942,41 M	37.044,34 M	110,523%	Sangat Efektif
2022	42.769,19 M	39.320,25 M	108,771%	Sangat Efektif

Keterangan :

Tidak efektif : <100%
 Efektif : 100%
 Sangat efektif : > 100%

Tabel 4. Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran	Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut Pad	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Rasio Efisiensi
2018	10.028,74 M	37.086,32 M	0,270%	Sangat Efisien
2019	10.028,74 M	39.344,67 M	0,255%	Sangat Efisien
2020	11.066,46 M	37.042,89 M	0,299%	Sangat Efisien
2021	10.640,87 M	40.942,41 M	0,260%	Sangat Efisien
2022	10.916,84 M	42.769,19 M	0,255%	Sangat Efisien

Keterangan :

Tidak Efisien : >100%
 Efisien : 100%
 Sangat efisien : < 100%

Tabel 5. Rasio Keserasian Belanja

Tahun anggaran	Total belanja tidak langsung	Total belanja daerah	Rasio belanja tidak langsung
2018	29.255,28 M	121.364,47 M	24,105%
2019	30.600,28 M	131.977,25 M	23,186%
2020	33.709,54 M	141.094,98 M	23,891%
2021	34.658,71 M	134.415,38 M	25,785%
2022	31.947,21 M	132.921,12 M	24,035%

Tahun anggaran	Total belanja langsung	Total belanja daerah	Rasio belanja langsung
2018	92.109,19 M	121.364,47 M	75,895%
2019	101.376,97 M	131.977,25 M	76,814%
2020	107.385,44 M	141.094,98 M	76,109%
2021	99.756,67 M	134.415,38 M	74,215%
2022	100.973,91 M	132.921,12 M	75,966%

Tabel 6. Share and Growth

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Belanja Daerah	Nilai
2018	37.086,32 M	121.364,47 M	30,558%
2019	39.344,67 M	131.977,25 M	29,812%
2020	37.042,89 M	141.094,98 M	26,254%
2021	40.942,41 M	134.415,38 M	30,460%
2022	42.769,19 M	132.921,12 M	32,177%
Rata-Rata Share			29,852%

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Growth
2018	37.086,32 M	-
2019	39.344,67 M	106,089%
2020	37.042,89 M	-105,850%
2021	40.942,41 M	110,527%
2022	42.769,19 M	104,462%
Rata-Rata Growth		53,807%

Dari hasil perhitungan rata-rata share dan growth terhadap LRA pemerintah provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2018-2022, maka di peroleh rata-rata yakni share sebesar 29,852% dan rata-rata growth sebesar 53,807%. Kemudian dengan pemetaan yang dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan daerah berdasarkan kuadran I, II, III dan IV posisi provinsi Jawa timur berada di kuadran nomor II

dengan penjelasan bahwasannya Share dan Growth tinggi. Akan tetapi kondisi ini dianggap belum ideal akan tetapi di sisi lain pengembangan potensi lokal, sehingga Pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja daerah masih tergolong rendah namun growth PAD dianggap tinggi. Ini berarti menjadi catatan tersendiri untuk pemerintah provinsi jatin agar lebih bisa menggali potensi daerah agar lebih maksimal, sehingga PAD dapat berperan besar dalam penyusunan APBD daerah provinsi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan dan analisis normatif laporan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa model hubungan tingkat kemandirian daerah masih dalam kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terletak pada kemampuan keuangannya yang masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan untuk tugas, pembangunan dan pelayanan sosial negara. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat kemandirian Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan pengolahan data LRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022 yaitu sebesar 53,807%. Hal ini dapat menunjukkan bahwasannya peranan pemerintah pusat sangat dominan dalam penyelenggaraan perekonomian provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, menunjukkan peranan pemerintah dianggap masih mendominasi, maka wajar jika tingkat desentralisasi perpajakan pada pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur masih kurang. Hal ini tercermin dari rata-rata tingkat desentralisasi keuangan publik dalam lima tahun sebesar 32.292 persen. Dengan kata lain, pemerintah pusat hanya memberikan sedikit kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Namun efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di provinsi Jawa Timur sudah efektif dan sangat efektif. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio efisiensi yang tinggi sebesar 107,272 dibandingkan dengan rata-rata rasio efisiensi rata-rata sebesar 0,268% selama lima periode perekonomian. Rasio pencocokan pengeluaran menunjukkan bahwa pengeluaran tidak langsung dan langsung tidak seimbang. Perhitungan rasio biaya tidak langsung terhadap biaya langsung menunjukkan bahwa provinsi lebih banyak mengeluarkan dana untuk biaya yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan. Biaya langsung harus lebih besar dari biaya tidak langsung.
2. Mengingat perhitungan norma Tingkat Kepatuhan Pengeluaran, keseimbangan antar

pengeluaran tidak membawa kata keseimbangan. Pemerintah daerah hendaknya lebih bersedia menggunakan dana untuk kegiatan belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk meningkatkan kualitas hasil, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dimungkinkan. Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur harus mengurangi ketergantungannya pada dana bantuan dari pemerintah pusat, guna mencapai tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

5.2 Saran

Bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Timur harus lebih meningkatkan SDA dan menggali potensi yang ada diwilayahnya sehingga dapat dijadikan sebagai pemasukan daerah guna menambah jumlah PAD untuk periode kedepan. Disamping itu, belanja pemerintah untuk administrasi dan akomodasi untuk tokoh publik/pelaku di bidang pemerintahan harap diminimalisir penegeluarannya agar dana yang terjun langsung ke masyarakat bisa cukup untuk semua kebutuhan di periode tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data -data resmi yang lebih banyak agar penelitian dapat dianggap akurat. Akan tetapi peneliti juga harus tetap terfokus pada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini data yang didapat harus relevan dengan penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengolahdata sekunder menjadi data yang bisa di uji menggunakan statistik agar pembahasan dapat lebih rinci dan juga jelas serta dapat menambhankuesioner apabila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- bpk.go.id. (n.d.). *LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. Retrieved August 23, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/80329/Lamp3.Pergub_39.pdf
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 51–65.

- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- kemendagri.go.id. (2023, May 31). *Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023, Kemendagri Turun Langsung ke Jawa Timur.*
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 3(1).
- Nasrum, M. (2018). *Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya.*
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443–456.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 6(1), 45–56.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).